

BAB I

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran penulis atas kebijakan pemberian sertifikat lahan nasional yang merupakan bagian dari proses neoliberalisme yang terjadi di Indonesia dimana dalam hal ini pemberian sertifikat lahan hanya mempermudah proses alih ruang sosial dalam hal ini lahan petani yang dikelola secara komunal atau kekeluargaan menjadi ruang ekonomi proses alih fungsi ruang ini merupakan bagian dari akumulasi melalui perampasan yaitu proses yang dilakukan oleh kapitalis dalam rangka memperluas sirkulasi kapitalnya dengan cara melakukan ekspansi ke segala arah diiringi dengan alih fungsi (baca : perampasan) terhadap ruang sosial yang sifatnya bisa komunal, dimiliki keluarga atau milik umum menjadi ruang ekonomi dalam konteks penelitian ini akumulasi melalui perampasan atau *accumulation by dispossession* bekerja dalam bentuk kebijakan pemberian sertifikat lahan nasional yang memberi dasar hukum bagi proses tersebut dimana selanjutnya petani dengan semakin mudah untuk menjual ruang hidupnya karna berbagai alasan baik akibat dari minimnya bantuan bagi petani dari pemerintah maupun akibat dari proses pembebasan lahan.

Proses Neoliberalisasi di Indonesia bukanlah suatu hal yang terjadi dalam semalam melainkan melalui serangkaian pertrungan sosial yang terjadi dari kurun waktu era kolonial Hindia Belanda hingga hari ini. Secara historis proses itu dimulai dengan terbentuknya dengan formasi kelas pada era kolonial dimana cikal bakal tuan tanah yang merupakan lawan dari petani terbentuk akibat ketergantungannya pada pemerintah kolonial dan kegagalannya membentuk kelas borjuasi nasional kemudian dilanjutkan dengan konflik antara tuan tanah dan petani selama orde lama yang mana konflik ini juga menjalar hingga parlemen misalnya konflik antara PKI dan Masyumi yang mana yang pertama merupakan sekutu utama petani dan yang kedua sekutu tauan tanah akibat peran tuan tanah

yang juga terkadang merangkap sebagai pemuka agama selanjutnya di tingkat ini konflik ini juga melahirkan UU no 5 tahun 1960 atau undang undang peraturan agraria . selain di tingkat parlemen konflik ini juga menjalar hingga ranah kebudayaan dimana LEKRA yang merupakan sekutu BTI dan PKI seringkali mengangkat konflik kelas dalam karya karyanya sedangkan lawanya MANIKEBU mengedepankan netralitas serta seni untuk seni. Proses selanjutnya adalah kemunduran panjang yang diawali dengan represi dan penghapusan terhadap seluruh elemen kiri baik PKI, BTI maupun LEKRA menyusul peristiwa 1 Oktober (GESTOK) yang kemudian dilanjutkan dengan hadirnya UU no 1 tahun 1967 mengenai penanaman modal asing dan juga kebijakan pemerintah lain seperti revolusi hijau untuk meningkatkan produksi padi dan menguatnya kapitalisme negara pada dekade awal rezim orde baru proses selanjutnya adalah masuknya neoliberalisme pada dekade 80an yang ditandai dengan berbagai paket kebijakan deregulasi di berbagai bidang untuk meningkatkan produksi non minyak bumi, menyusul turunya harga minyak dunia. Setelah runtuhnya orde baru pasca reformasi proses neoliberalisasi di Indonesia memasuki tahap baru dimana hal ini ditandai UU penanaman Modal atau UU no 25 Tahun 2007 yang memperbaharui UU no 1 Tahun 1967 disamping kemudian mengeluarkan kebijakan pemberian sertifikat lahan nasional yang ditunjukan untuk mengurangi berbagai konflik agraria serta memberi kepastian tanah bagi petani.

Ironisnya tidak seperti yang dikatakan oleh pemerintah, program kebijakan tersebut masih gagal menyelesaikan konflik agraria secara keseluruhan hal ini dibuktikan dengan masih adanya lebih dari dua ratus kasus agraria di tahun 2020 (Kompas.com, 6 Januari). sementara itu laporan akhir tahun KPA tahun 2019 menyatakan pada tahun 2019 terdapat 279 konflik agraria dengan luas wilayah lebih dari 700,000 hektar dan masyarakat terdampak sebanyak lebih dari 109000 KK, sekalipun jumlah konfliknya lebih rendah dari pada tahun 2018 dengan jumlah konflik lebih dari 400 namun dari segi jumlah korban dan mereka yang

berurusan dengan hukum untuk melindungi tanahnya maka KPA menemukan adanya peningkatan yang signifikan (Laporan Akhir TAHUN KPA, 2019 : 3-4). selain tidak dapat menyelesaikan konflik agraria hadirnya kebijakan ini juga tidak mampu untuk menyelesaikan masalah berkurangnya petani, ini dibuktikan dengan berkurangnya persentase jumlah petani dari 65,8 persen di tahun 1976 menjadi 28 persen pada tahun 2019 sedangkan luas tanah untuk pertanian menurun sebanyak 300,000 Hektar jika dibanding dengan tahun 2013 sebesar 7,75 Juta hektar (Kompas.com, 23 Maret 2021). oleh karna data diatas yang menunjukan bahwa kebijakan pemberian sertifikat lahan nasional yang bukan hanya gagal untuk menyelesaikan permasalahan agrarian, karna memandang permasalahan ini sekedar masalah bukti kepemilikan ditambah potensi perampasan tanah maka menjadi penting untuk mengkaji neoliberalisme muncul dan bekerja dalam kebijakan pemberian sertifikat lahan nasional.

1.2 Masalah penelitian

Pengalaman politik agraria Indonesia sejak era akhir kolonial hingga hari ini merupakan bagian dari pertentangan kelas social, dimana hal ini bisa dilihat dari tarik ulur dalam pembentukan dan pelaksanaan UU no 5 Tahun 1960, munculnya berbagai UU yang memberi karpet merah bagi ekspansi kapital di indonesia seperti UU no 1 Tahun 1967 serta berbagai konflik agraria dari era orde lama hingga era reformasi, yang jumlahnya pada tahun 2019 sebanyak 279 konflik. sementara itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian sertifikat lahan nasional dimana sekalipun di luar nampak baik dengan memberi kepastian hukum bagi petani serta memudahkan petani untuk lepas dari jerat rentenir, namun jika kebijakan ini tidak diiringi dengan redistribusi lahan secara signifikan dan juga subsidi bagi petani maka hanya akan mempercepat proses beralihnya ruang sosial atau dalam hal ini lahan pertanian warga yang dikelola secara kekeluargaan atau komunal menjadi ruang ekonomi. hal ini dibuktikan dengan

berkurangnya jumlah persentase petani terhadap seluruh jumlah profesi nasional yang jumlahnya hanya tinggal 28% dari jumlah seluruh pekerja sedangkan pada 1976 jumlah petani 65,8 % dari seluruh pekerja nasional jumlah ini diakibatkan dengan meningkatnya alih fungsi lahan (Vice.com,25 maret 2021) Berangkat dari permasalahan berikut penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a) Bagaimana pertarungan sosial yang menyejarah beroprasi dan membentuk kebijakan reformasi agraria pada pemerintahan Jokowi Widodo ?
- b) Bagaimana beroprasinya kebijakan neoliberalisme dalam kebijakan pemberian sertifikat lahan nasional di pemerintahan Jokowi Widodo ?

1.3 Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan sebagai berikut yaitu

- a) Mengetahui Seperti apa pertarungan sosial yang menyejarah bekerja membentuk kebijakan reformasi agraria pada pemerintahan Jokowi Widodo.
- b) Mengetahui Seperti apa kebijakan neoliberalisme beroprasi dalam pemberian sertifikat lahan nasional di pemerintahan Jokowi Widodo.

Penelitian ini memiliki Manfaat sebagai berikut yaitu

- a) Sebagai kajian terhadap peraktek neoliberalisme di Indonesia.
- b) Sebagai upaya menambah kajian baru atas kajian politik agraria.

1.4 Kerangka Teori Konseptual

1.4.1 *Neoliberalisme*

Neoliberalisme memiliki banyak interpretasi sekalipun secara umum adalah meluasnya sistem pasar pada seluruh bidang yang mana tadinya ruang negara atau sosial (tanah komunal, hutan adat dan lainnya) melalui privatisasi yang mana dalam hal ini neoliberalisme memandang bahwa proses itu berguna untuk menghindari *tragedy of common* (Harvey, 2005 :65) neoliberalisme juga pemaksaan agar perlindungan negara melalui berbagai regulasi dihilangkan dan diarahkan untuk mengintegrasikan ekonomi kearah sistem pasar, namun begitu Neoliberalisme tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan Liberalisme sekalipun keduanya membenadang bahwa hak atas properti dan pasar bebas sebagai suatu yang *sakral* hal ini secara umum terlihat bahwa Neoliberalisme memandang aspek-aspek Liberalisme seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul/berserikat dapat dikesampingkan untuk mencapai tujuan neoliberalisme, kenyataanya banyak rezim otoritarian mengadopsi neoliberalisme juga menunjukan perbedaan diantara keduanya . disamping itu Neoliberalisme juga memandang bahwa kebebasan pasar berbanding lurus dengan kebebasan individual sebagaimana dinyatakan oleh David Harvey dalam bukunya *A Brief History of Neoliberalisme*(2005) .

“Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and free trade. (Harvey, 2005 :2)

Berdasarkan bagian sebelumnya secara umum dapat dilihat bahwa neoliberalisme megurangi keterlibatan negara di berbagai bidang yang pada akhirnya secara teotitik akan berdampak pada kebebasan individu dan kemudian politik sebagaimana dikemukakan oleh ahli ekonomi Friedrich Hayek dalam bukunya *Road to Serfdom* yang mana ia berargumen bahwa kontrol atas ekonomi bukan hanya berdampak pada sektor tersebut namun juga pada sektor lainnya seperti demokrasi dan kebebasan individu (Hayek,2006 : 95) jika berpegang pada

apa yang dikatakan Hayek maka dapat dikatakan demokrasi dan liberalisasi ekonomi akan berbanding lurus namun ironisnya dalam beroprasinya neoliberalisme dapat membuat negara menjadi kuat dan bersifat otoritarian dimana hal itu penting untuk memastikan berjalanya target-target dari kebijakan neoliberal.

“The scientific rigour of its neoclassical economics does not sit easily with its political commitment to ideals of individual freedom, nor does its supposed distrust of all state power fit with the need for a strong and if necessary coercive state that will defend the rights of private property, individual liberties, and entrepreneurial freedoms” (Harvey, 2005 : 21)

Kutipan dari Harvey diatas menyatakan bahwa sekalipun secara ideal neoliberalisme menjanjikan pengkerdilan peran negara di berbagai bidang dan bahkan mencurigainya namun pada akhirnya ia tetap harus mempertahankan aparatus Negara yang bisa bersifat koersiv dalam rangka mengimplementasikan kebijakan neoliberal itu sendiri lebih jauh Harvey juga menyatakan bahwa dalam prakteknya negara perlu hadir dalam pembentukan pasar di sektor sektor yang belum tersentuh misalnya pada bidang pertanahan, jaminan kesehatan air, pendidikan, jaminan sosial dan juga lingkungan (Harvey, 2005 : 2) Harvey kemudian juga menyatakan bahwa neoliberal memandang demokrasi dengan curiga bahwa kekuasaan yang dipegang oleh mayoritas rakyat akan berpotensi mengancam hak individu dan lebih menyetujui kekuasaan yang dipegang oleh elit dan ahli alih-alih rakyat (Harvey, 2005 : 66) hal senada juga dinyatakan Philip Mirowski dalam artikelnya yang berjudul the thirteen commandments of neoliberalism

“The starting point of neoliberalism is the admission, contrary to classical liberal doctrine, that their vision of the good society will triumph only if it becomes reconciled to the fact that the conditions for its existence must be constructed, and will not come about “naturally” in the absence of concerted political effort and organization. As Michel Foucault presciently

observed in 1978, “Neoliberalism should not be confused with the slogan ‘laissez-faire,’ but on the contrary, should be regarded as a call to vigilance, to activism, to perpetual interventions.” The injunction to act in the face of inadequate epistemic warrant is the very soul of the Neoliberal Thought Collective. Classical liberalism, by contrast, disavowed this precept. The neoliberals reject “society” as solution, and revive their version of authority in new guises. This becomes transmuted into various arguments for the existence of a strong state as both producer and guarantor of a stable market society. (Mirowski, 2013)

Penjelasan Philip Mirowski diatas lebih detail dalam menerangkan bahwa neoliberalisme tidak berbanding lurus dengan berkurangnya peran negara di berbaagi bidang, peningkatan kebebasan individu bahkan dengan slogan ekonomi *laissez-faire* ini dikarnakan dalam implemntasi di lapangan peran negara menjadi kuat dan juga dapat bersifat koersif yang mana hal ini terjadi dikarnakan pembentukan masyarakat kapitalis yang baik dari segi visi neoliberal tidak terjadi secara alamiah namun diciptakan pra kondisinya. misalnya yang terjadi di Chile ketika sebagian besar penduduknya memilih Salvador Allende yang merupakan seorang marxis maka untuk menciptakan “*good society*” di negara tersebut diktator seperti Pinochet beserta kebijakan otoritariansya harus dihadirkan.

Dari pandangan Harvey dan juga Mirowski menunjukan neoliberalisme memiliki kontradiksi didalamnya di satu sisi melihat bahwa perluasan pasar akan berjalan beriringan dengan kebebasan individu namun disisi lain dalam praktiknya neoliberalisme juga diterpkan dalam pemerintahan yang bersifat otoritarian bahkan tidak ragu menggunakan kekuatan koersif untuk mengimplementasikan kebijakanya misalnya dalam merepresi serikat pekerja selain itu jika neoliberalisme mendorong kebebasan kenyataan di lapangan menunjukan hal yang berbeda bukan hanya pandangan ilmuan diatas namun percobaan neoliberalisme pertama di Chile berhasil akibat otoritarianisme

Pinochet yang merepresi apapun yang menjadi penghalang bagi implementasi kebijakan neoliberal yang mana hal ini termasuk serikat buruh, partai politik dan lainnya. selain di Chile penerapan penerapan neoliberalisme di Indonesia pada era orde baru juga ada pada masa otoritarianisme sekalipun rezim orde baru tidak perlu lagi melakukan “pembersihan” besar-besaran sebagaimana Chile dibawah pinochet dikarnakan hal itu sudah terpenuhi sejak pembantaian 1966-1967 atau kurang lebih dua dekade sebelum dimulinya implementasi kebijakan neoliberal melalui berbagai paket kebijakan deregulasi. Contoh ketiga adalah RRT dibawah Deng Xiaoping yang melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1980an yang mana reformasi tersebut termasuk pembukaan RRT untuk investasi asing, penciptaan persaingan antar perusahaan negara, introduksi harga pasar dan juga desentralisasi yang meningkatkan inisiatif daerah dalam bidang ekonomi (Harvey,2005 : 121) sebagaimana dua contoh sebelumnya pengimplementasian neoliberalisme di RRT terjadi dibawah rezim otoritarian hal ini bukan hanya tidak terdapat persaingan politik eksternal di negara tersebut (RRT merupakan negara partai tunggal dan persaingan terjadi dalam internal partai) namun juga terjadinya peristiwa lapangan Tiananmen dimana tank tank menggilas pendemo baik yang menginginkan kebebasan lebih luas di bidang sosial politik maupun menolak reformasi ekonomi Deng Xiaoping. Contoh-contoh diatas dan pandangan teoritis pada halaman sebelumnya juga memperjelas perpisahan Neoliberalisme dan Liberalisme yang penulis jabarkan pada halaman 5 yang mana Liberalisme melihat kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat dan aspek sosial politik lain dari Liberalisme tidak dapat dikesampingkan atau menjadi aspek yang bersifat *secondary*.

Sementara Harvey melihat neoliberalisme sebagai suatu bentuk kebijakan ekonomi yang hadir atas respon stagnansi kebijakan *mix economy* dan juga pertentangan kelas (respon kapitalis atas naiknya kekuatan sosial demokrat dan

kalangan kiri lainnya) Matthew Eagleton-Pierce dalam *Historicizing The Neoliberal Spirit of Capitalism* menyatakan bahwa neoliberalisme merupakan suatu arwah ideologi terkini dalam sejarah kapitalisme yang mana ia kemudian mengasosiasikanya dengan tiga arwah leberalisme yaitu Individualisme, Universalisme dan Meliorisme (Pierce, 2016) dalam individualisme misalnya neoliberalisme menjadikan individualisme sama dengan konsumen dimana kata tersebut kemudian juga meluas keara lain misalnya politik dan pendidikan. Ataupun dengan menjadikan kompetisi dan pilihan sebagai alat utama untung membimbing bagaimana masyarakat bergerak maju.

“The neoliberal twist on ‘individual’ is distinctive in at least two ways. First, the category of the ‘consumer’ has now extended into other fields, such as politics, education, and health. While ‘consumer’ has always carried an unfavourable tone, initially meaning to destroy and to waste, one could argue that the popularization of the term beyond purely commercial settings is helping to neutralize this criticism. Second, with the valorization of choice and competitiveness as guiding principles for societal organization, the appeal to personalization and customization offers further extensions of neoliberal thinking” (Pierce, 2016)

Selanjutnya pada universalisme sebagaimana diungkapkan Marx bahwa kapitalisme mempunyai sifat untuk terus menerus meluas dan melawan segala hambatan atau jika menggunakan Harvey kapitalisme memiliki sifat untuk membuat ruang baru untuk untuk memperbaiki masalahnya. Selanjutnya kecendrungan kapitalisme untuk terus meluas kemudian berkembang menjadi imperialisme di abad 19 tepatnya ketika sebagian besar nagara eropa dalam usahanya mencari pasar baru dan bahan baku murah menjadikan imperialisme sebagai hal yang lumrah dengan justifikasi bahwa mereka yang bukan bangsa eropa merupakan bangsa terbelakang yang harus dimajukan oleh orang eropa melalui imperialisme abad 19. (Pierce, 2016) selanjutnya dalam masa ketika neoliberal menjadi dominan pasar menjadi suatu yang universal bahkan

neoliberalisme seringkali dinayatkan sebagai tirani pasar, hal ini terlihat ketika berakhirnya perang dingin ketika ungkapan pasar dunia menjadi sangat umum yang mana berimplikasi pada kecenderungan negara-negara di dunia menjadikan visi berdasarkan pasar sebagai suatu yang ideal. (Pierce, 2016)

Terakhir pada meliorisme pierce berpendapat bahwasanya kapitalisme harus dapat memenuhi janjinya (sekalipun secara parsial) alih-alih hanya sebuah fantasi dimana hal ini akan memberikan gambaran bahwa jika seseorang berusaha maka ia akan mendapatkan kesuksesan yang dijanjikan oleh kapitalisme sebagai contoh di AS kata kelas menengah menunjukkan kalangan yang sedang menyusul untuk menjadi kalangan kelas atas. dalam neoliberalisme meliorisme kemudian diangkat pada tingkat yang lebih tinggi yaitu pada level negara bangsa dimana naiknya ekonomi bagi beberapa negara-negara dunia ketiga (Brazil, RRT dan India) menunjukkan bahwa globalisasi dan pasar dunia bekerja.

Secara historis perkembangan Neoliberalisme dimulai sejak abad ke 19 dimana istilah tersebut ada untuk menelaskan pandangan ahli ekonomi italia Maffeo Pantaleoni kemudian namun pada masa itu selama dekade ke 3 abad 20 muncul diskusi dan perdebatan intelektual mengenai kebutuhan untuk mengubah liberalisme ekonomi yang ada yang mana hal ini dianggap gagal akibat depresi besar ekonomi (*Great Depression*) pada dekade 30an dan mereka menamai pandangan tersebut sebagai Neoliberalisme kelompok diskusi tersebut pecah antara dua kubu yaitu mereka yang dipimpin Walter Lippman dan Alexander Rustow yang melihat bahwa negara yang kuat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan berjalan mulus mereka menamai dirinya dengan ordo liberalisme yang kelak melahirkan teori developmentalisme, sedangkan yang lain dipimpin oleh Fredrich Hayek, Ludwig von Mises dan Milton Friedman menyatakan bahwa

peran negara hanya sebatas untuk memastikan hilangnya rintangan pasar, kelompok ini kemudian mendirikan *montplarin society* yang mena kelak akan berkembang menjadi neoliberalisme. namun begitu pada masa ini pandangan neoliberalisme sebagai yang dikenal belum sepenuhnya terbentuk dan neoliberalisme secara umum masih belum berpisah dari liberalisme secara umum sekalipun keduanya semakin menjauh terutama ketika liberalisme bergerak menuju apa yang disebut liberalisme sosial yang memberi perhatian lebih pada sektor-sektor sosial seperti jaminan sosial, kesehatan, pendidikan atau secara umum *welfare state* .

Pandangan yang kelak menjadi neoliberalisme tidaklah segera menjadi pandangan ekonomi yang mapan hal ini akibat meleusnya perang dunia ke 2 dan mainstremnya *mix economy* pada dekade awal pasca perang dunia II dimana kebanyakan intelektual pada masa itu memandang bahwa negara setabil hanya dengan rekonsiliasi antara buruh dan pasar, kegaglan implementasi kapitalisme maupun sosialisme secara utuh dan perlunya kontruksi atas negara, pasar dan instiusi demokratis yang terintegrasi untuk menjamin stabilitas (Harvey, 2005 : 10) Hal ini diterjemahkan dengan berjalanya pasar, aktifitas entrepreneurship yang diregulasi dan intervensi negara untuk memastikan negara hadir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberi berbagai layanan pada masyarakat serta memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan pada masyarakat.(Harvey,2005 :10) Sistem ini pada giliranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara masif pada 1950an yang mana hal ini segera diadopsi oleh banyak negara.

Namun begitu sistem ini mulai menunjukkan kelemahanya dimana inflasi dan pengangguran meningkat pada dekade akhir 1960an yang mana menyebabkan suatu alternatif harus muncul dan pada masa itu jawaban yang muncul adalah dengan peningkatan kontrol negara dengan strategis korporatisme hal ini

terutama diterapkan oleh negara yang kalangan sosial demokrat sedang berkuasa terutama di swedia, portugal dan itali namun begitu penerapan seperti itu juga berlaku di AS yang mana bahkan presiden asal Nixon asal republikan menyatakan kita semua adalah Kynesian. (Harvey, 2005 : 13) seiring berjalanya waktu kebijakan ini juga banyak ditentang dan akhirnya memicu banyak perdebatan yang mana kemudian memunculkan dua kubu antara pro sosial demokrasi dan ekonomi terpimpin disatu sisi dan pro kebebasan pasar disisi lain, dan pada dekade 90an pihak kedua telah menang dimana banyak negara telah mengadopsi neoliberalisme mulai dari Chile yang menjadi “lab percobaan” ekonomi neoliberal dibawah diktator pinochet bahkan sejak tahun 1970an, kemudian disusul oleh Margareth Thatcher di Inggris dan kemudian Ronald Reagan di AS setelahnya banyak negara dunia mengadopsi neoliberalisme, bahkan negara yang tadinya memiliki kekuatan kiri cukup dominan misalnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Swedia dimana yang pertama merupakan negara sosialis dan hingga hari ini Partai Komunis Tiongkok masih berkuasa dan yang kedua merupakan benteng dari pemerintahan sosial demokratik.

Harvey berargumentasi bahwa kemenangan kalangan sosial demokrat pada dekade sebelumnya adalah kemenangan kelas kapitalis yaitu mereka dapat membeli waktu dan kompromi untuk mengagalkan reformasi yang lebih besar kenyataanya pada awal tahun 1970an kalangan sosialis dan sosial demokrat sedang naik daun di negara-negara kapitalis yang mapan dan reformasi yang tertahan pada akhirnya menyebabkan bangkitnya kalangan neoliberal apalagi ketika kalangan sosial demokrat melemah sebagaimana disebutkan oleh harvey the brief history of neoliberalism.

“Communist and socialist parties were gaining ground, if not taking power, across much of Europe and even in the United States popular forces were agitating for widespread reforms and state interventions.

There was, in this, a clear political threat to economic elites and ruling classes everywhere, both in the advanced capitalist countries (such as Italy, France, Spain, and Portugal) and in many developing countries (such as Chile, Mexico, and Argentina).”(Harvey,2005: 15)

Selain kepentingan kelas kapitalis hal lain yang menjadi salah satu alasan mengapa neoliberalisme sukses adalah percobaan di chile dimana segera setelah Pinochet menjadi diktator di negara tersebut pada tahun 1973 ia menjadikan chile sebagai suatu lab ekonomi. hasilnya Chile mengalami pertumbuhan pesat ekonomi sesaat yang pesat namun tentu saja hal ini berjalan dengan represi dan penindasan pada semua elemen yang menghalangi hal ini menunjukkan peran penting negara dalam mensukseskan kebijakan neoliberalisme bagi pendukung kebijakan ini di negara dunia pertama percobaan di Chile akhirnya di cangkakan pada negaranya masing-masing dan pada awal dekade 90an neoliberalisme menjadi suatu hal yang umum.

“The coup in Chile and the military takeover in Argentina, promoted internally by the upper classes with US support, provided one kind of solution. The subsequent Chilean experiment with neoliberalism demonstrated that the benefits of revived capital accumulation were highly skewed under forced privatization. The country and its ruling elites, along with foreign investors, did extremely well in the early stages” (Harvey,2005 : 15-16)

Pasca menjadi suatu hal yang umum di negara dunia pertama Neoliberalisme kemudian juga mulai diadopsi di belahan dunia lain. perlu juga diingat bahwa perkembangan neoliberalisme bukan hanya sebagai suatu yang diambil secara pragmatis namun dalam perjalanannya melalui oprasi ideologi dimana media, pendidikan sebagai aparatus ideologi bekerja menjadikan neoliberalisme sebagai suatu hal yang lumrah hal ini juga dilakukan dengan dukungan korporasi dan kemudian menjalar pada partai politik dan akhirnya negara Friedrich Hayek sendiri sebagai pemiki neoliberal menyatakan bahwa pertarungan antara ide

merupakan suatu kunci bukan hanya dalam menghadapi marxisme namun juga intervensi kaynesian, *state planning* dan juga sosialisme yang mana hal ini dapat dimenangkan dalam satu generasi (Harvey, 2005 : 21)

Menurut Harvey masuknya neoliberalisme di berbagai negara memiliki cara yang berbeda. di inggris ketika Tactcher naik menjadi Perdana Menteri negara tersebut ia menghadirkan neoliberalisme sebagai solusi atas stagnansi ekonomi dibawah pemerintahan Partai Buruh, dimana ia mereformasi ekonomi inggris hal itu dimulai pada bidang fiskal dengan meninggalkan kebijakan ekonomi kaynesian untuk menanggulangi stagflasi yang kemudian merambat pada bidang sosial ekonomi dan politik yang lebih luas, dengan melemahkan serikat buruh, membentuk iklim bisnis yang baik, menghapus komitmen atas *welfare state*, pengurangan pajak, privatisasi perusahaan negara seperti perumahan rakyat, mendorong masuknya investasi asing dan menyerang segala bentuk solidaritas sosial atau seperti yang tatcher katakan bahwa tidak ada masyarakat hanya ada individu pria dan wanita (Harvey, 2005 : 22). contoh lain implemntasi neoliberalisme adalah di Mexico dengan hadirnya privatisasi sektor publik untuk melunasi hutang dan “menyerang” sektor agrarian pertama dengan regulasi yang memperbolehkan dan mendorong tanah *ejido* (komunal) untuk dimiliki oleh privat yang mana hal ini bertentangan dengan konstitusi 1917 yang berasal dari revolusi Mexico. Kedua dengan mempermudah ekspor produk pertanian seperti jagung dari AS yang mendorong jatuhnya harga produk pertanian (Harvey, 2005 : 100-101).

Harvey kemudian juga menjelaskan pengalaman Neoliberalisme di Argentina yang ia sebut rollercoaster dimana pada mulanya masuknya Neoliberalisme diawali bersamaan proses demokratisasi yang perlahan hal ini mengingat Argentina sebelumnya merupakan pemerintah authoritrian yang korup dan juga korporatis. hal ini berwal dengan naiknya Charlos Menem sebagai orang nomor satu negara tersebut pada dekade 90an dimana ia memulai serangkaian reformasi

seperti membuka diri pada perdagangan internasional, mengendurkan regulasi pekerja, dan melakukan privatisasi atas perusahaan negara atau sebagaimana dituliskan oleh Harvey

“Though a Peronist, Menem set about liberalizing the economy, partly to curry favour with the US but also to re-establish Argentina’s credentials in the international community in the wake of the revelations of the ‘dirty war’ that sullied its reputation. Menem opened the country to foreign trade and capital flows, introduced greater flexibility into labour markets, privatized state-owned companies and social security, and pegged the peso to the dollar in order to bring inflation under control and provide security for foreign investors.”(Harvey, 2005 : 104)

Argentina kemudian mengalami kemajuan ekonomi namun begitu pengalaman yang dialami Argentina kemudian mulai memberi efek samping misalnya terjadi pengangguran dimana-mana dan masuknya uang pada negara ini kemudian mulai berhenti ketika krisis Tequila yang dimulai di Mexico menyebar ke Argentina dan semenjak negara tersebut mulai jatuh dimana angka pengangguran terus meningkat hal ini kemudian diperparah dengan menyebarnya krisis ekonomi asia ke Brazil dan kemudian memberi efek pada argentina hasilnya kemudian menjadi bencana sebagaimana ditulis oleh Harvey.

“ Argentina’s debt more than doubled between 1995 and September 2001, while foreign exchange reserves were fast disappearing. The interest payment due on the debt soared to \$9.5 billion by 2000...In 2001 the Argentine banking system lost more than 17 per cent of its deposits (\$14.5 billion). Perhaps as much as \$2 billion was lost on 30 November alone.”(Harvey, 2005 : 105)

Di masyarakat hal ini berakhir dengan meningkatnya pengangguran secara besar-besaran, dan pendapatan menjadi jatuh hal ini menyebabkan munculnya solidaritas lingkungan penduduk dan juga penguasaan pabrik yang ditutup agar

dapat terus memberi makan pekerjaanya namun begitu krisis ekonomi ini nampaknya mulai mereda pada 2004.

Harvey juga menjelaskan pengalaman Swedia, dimana ia memulainya dari naiknya kekuatan kelas pekerja pada tahun 60an dan kuatnya *Welfare State* hal ini terjadi berkat kekuasaan kalangan sosial demokrat di Swedia sejak dekade 30an hal ini kemudian juga diperkuat dengan semangat redistribusi kekayaan yang dilontarkan pemerintah dan pada titik ini perjuangan kelas dapat dimenangkan kelas pekerja Swedia secara gradual atau merupakan titik terdekat untuk mendirikan kediktatoran proletariat secara damai dan gradual namun begitu kalangan kapitalis kemudian memulai suatu rencana perlawanan.

Pada mulanya mereka mulai melakukan propaganda dalam kampanye untuk melawan regulasi dan pajak dan hal ini memberi harapan dengan kemenangan partai konservatif pada 1976 namun begitu partai tersebut gagal memberi keinginan mereka dan sosial demokrat kembali berkuasa (Harvey, 2005 : 113). Hal selanjutnya yang dilakukan mereka adalah melemahkan kekuatan serikat buruh dengan melakukan negosiasi upah bukan lagi melalui negosiasi sentral namun perusahaan dan hal ini disetujui oleh satu serikat yang konsekuensinya melemahkan kekuatan kolektif serikat hal ini kemudian juga ditambah peran intelektual dimana debat mengenai deregulasi dan privatisasi berjalan dengan retorika mengenai kebebasan individu yang berimplikasi pada pelemahan *Welfare State* dimana hal tersebut dianggap bertanggung jawab atas stagnansi ekonomi.

“But most efficacious of all was the propaganda campaign waged by the employers. They used their control over the Nobel Prize in Economics to consolidate neoliberalism within Swedish economic thinking. Long-standing complaints on the part of intellectuals and professionals regarding the oppressive universalisms and high taxation

policies of the Swedish state were assiduously cultivated through a rising tide of rhetoric lauding individual liberties and freedoms. These debates reverberated throughout the media and gained increasing currency in the popular imagination.” (Harvey, 2005 : 113)

Puncak dari ini semua adalah dengan kemenangan partai konservatif pada 1991 yang mana memberi paket kebijakan dengan memastikan misi utama perbankan Swedia bukan lagi menjamin pemenuhan lapangan kerja namun pencegahan inflasi tetapi sebelumnya kebijakan yang mengarah pada neoliberalisme seperti deregulasi atas Bank serta pemotongan pajak bagi kalangan kelas atas juga sudah diambil oleh pemerintahan sosial demokrat pada dekade sebelumnya.

“The real shift towards neoliberalism came with the election of a Conservative government in 1991. But the way had already been partially prepared by the Social Democrats, who were increasingly pressed to find ways out of the economic stagnation. Their partial implementation of some parts of the neoliberal agenda suggested acceptance of the persuasive analyses of the SNS. It was the left rather than the right that now lacked ideas. The unions were persuaded to exercise wage restraint in order to raise profits and encourage investment. Deregulation of banking (which led to a classic speculative bubble in credit allocation and the housing market) and tax cuts for the wealthiest (again supposedly to encourage investment) had already occurred in the late 1980s. The central bank (always Conservative) finally switched its mission to fighting inflation rather than maintaining full employment.” (Harvey, 2005 : 113-114)

Hal ini kemudian meningkatkan angka pengangguran dan memaksa Swedia masuk Uni Eropa yang kemudian membuat Swedia kehilangan kemampuan untuk mewujudkan Wlelfare State seperti pada masa sebelumnya dimana redistribusi pendapatan dan pemenuhan lapangan kerja bukan lagi menjadi ujung tombak tujuan ekonomi, walupun begitu nasib yang dilalui oleh Swedia jauh

lebih baik dari pada inggris atau AS setidaknya sisa-sisa *Welfare State* di Swedia masih terlihat jelas.

pengalaman yang diperoleh beberapa negara diatas menunjukkan bahwa neoliberalisme masuk dan diadopsi suatu negara dengan cara yang berbeda-beda misalnya di Chile masuknya neoliberalisme dimulai dengan naiknya diktator Auguste Pinochet yang didukung oleh AS dan kemudian melakukan reformasi neoliberal didampingi oleh “mafia” Chicago disamping dengan melakukan represi besar-besaran terhadap segala rintangan (serikat buruh, kalangan kiri dan lainnya) di Iraq yang mejadi lokasi petualangan militer AS hadirnya neoliberalisme dipaksakan melalui perang dan penundukan, sedangkan masuknya neoliberalisme ke negara barat seperti AS dan Inggris melalui cara yang lebih halus dengan dukungan kalangan intelektual neoliberal dan juga munculnya kebijakan tersebut dibawah Ronald Reagan di AS dan Margareth Thatcher di Inggris

dalam konteks indonesia neoliberalisme dapat ditarik hingga paket kebijakan regulasi pemerintah orde baru pada tahun 1980 akibat penurunan harga minyak global pada saat perubahan ini banyak yang mengharapkan bahwa kebijakan ini akan memunculkan ekonomi pasar, menghilangkan monopoli dan kemudian pergerakan kearah demokratisasi namun yang terjadi adalah naiknya kalangan oligarki yang merupakan bagian dari aliansi bisnis-politik suharto. Pasca reformasi tahun 1998 proses neoliberalisasi terus berjalan baik dari segi kebijakan yang dibuktikan dengan kebijakan pemebrian sertifikat lahan nasional yang tidak diiringi dengan peningkatan redistribusi tanah dan dukungan terhadapnya maupun dari segi perundang-undangan yang dibuktikan adanya UU no 25 tahun 2007 yang memperpanjang waktu HGU dan juga menyerahkan beberapa ruang

yang tadinya merupakan domain negara seperti air minum sementara itu oligarki yang naik dengan implementasi kebijakan neoliberal pada era orde baru mengalami goncangan pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998 namun mampu bertahan pada posisi struktural dengan meningkatkan investasi di bidang sumber daya alam seperti migas dan batu bara, kemudian perkebunan seperti sawit dan juga properti hal ini menjadikan mereka menunggangi agenda neoliberal di indonesia.

1.4.2 *Accumulation by Dispossession*

Accumulation by dispossession atau akumulasi melalui perampasan berawal penyempurnaan penjelasan Marx mengenai beroprasinya sirkulasi kapital dimana dalam pandangan marx dikarenakan dalam sirkulasi tersebut kapitalis tidak mampu menjual produknya (daya beli proletar yang memproduksinya tidak mampu membeli barang tersebut) atau diistilahkan dengan *overaccumulation* menyebabkan kapitalisme runtuh namun pada kenyataan mereka melakukan ekspansi dalam rangka memperluas pasar, mendapatkan barang murah, lahan produksi yang lebih besar dan angkatan kerja (Harvey, 2003 : 139) Harvey lebih jauh selanjutnya juga menjelaskan bahwa di masa sebelumnya pada proses akumulasi primitif ditemukan berbagai proses seperti mengubah bentuk kepemilikan menjadi kepemilikan privat dari bentuk kepemilikan lainya seperti kepemilikan komunal atau negara, merepresi hak bersama, komodifikasi pekerja, penghilangan bentuk-bentuk produksi dan konsumsi alternatif yang dimiliki masyarakat asli, imperialisme, kolonialisme dan hutang nasional (Harvey, 2003: 145) dalam rangka menjawab masalah stagnansi dalam sirkulasi kapital yang kecil, peristiwa yang terjadi dalam akumulasi primitif tetap terjadi di abad modern dimana pembentukan petani tak bertanah melalui berbagai peristiwa *land grabbing*, privatisasi perusahaan negara dan konversi pertanian kecil milik keluarga menjadi milik perusahaan agro industri tetap terjadi di banyak negara

(Harvey, 2003 :145-146). hal tersebut oleh Harvey disebut sebagai akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*). dalam prakteknya akumulasi melalui perampasan beroperasi dengan dua cara pertama melalui invasi seperti apa yang terjadi di Iraq ketika pasukan invasi AS yang menduduki Iraq pasca perang teluk II memaksa negara tersebut membuat berbagai kebijakan privatisasi berbagai sumber kecuali minyak

“The Bush administration’s answer to this question was spelled out on 19 September 2003, when Paul Bremer, head of the Coalition Provisional Authority, promulgated four orders that included ‘the full privatization of public enterprises, full ownership rights by foreign firms of Iraqi businesses, full repatriation of foreign profits . . . the opening of Iraq’s banks to foreign control, national treatment for foreign companies and . . . the elimination of nearly all trade barriers’.The orders were to apply to all areas of the economy, including public services, the media, manufacturing, services, transportation, finance, and construction.” (Harvey, 2005)

sedangkan yang kedua melalui cara yang lebih halus yaitu mengeluarkan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan agenda neoliberal baik atas dorongan lembaga supra negara seperti WTO atau IMF maupun atas dorongan internal misalnya apa yang terjadi di Inggris dibawah Thatcher, pada model ini hukum atau regulasi berperan sebagai kerangka legal dalam melakukan *accumulation by dispossession*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Fokus dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kritis yang mena pendekatan ini membahas secara dialektik dan lebih dalam suatu permasalahan

menurut Christian Fuchs bahwa pendekatan kritis adalah melihat masyarakat secara dialektik dengan menganalisa ideologi, eksploitasi, dominasi dan ekonomi politik dimana Jika pendekatan normatif yang berdasarkan justifikasi dan dominasi bermasalah maka pendekatan yang bebas dari dominasi masyarakat merupakan suatu hal yang diperlukan (Fuchs, 2015) sementara itu Lawrence Neumann dalam *basic of social research* menyatakan bahwa setiap penelitian tidaklah bebas nilai dan setiap penelitian memiliki agenda politik tertentu oleh karenanya pendekatan kritis memiliki tujuan *praxis* dimana teori digunakan untuk membantu peneliti dalam memilih aksi yang harus dilakukan untuk melakukan pembaharuan sosial sedangkan pengalaman riset kemudian digunakan untuk menyusun riset kembali (Neumann, 2007 : 44) adapun dalam penelitian ini metode kritis akan digunakan untuk menganalisa lebih mendalam terhadap fokus penelitian disamping juga memobongkar relasi kuasa serta hegemoni yang membentuk konsensus kebijakan yang dipengaruhi ideologi neoliberalisme.

Penelitian berjudul “neoliberalisme pada politik agraria : analisis kebijakan pemberian sertifikat lahan nasional” ini akan berfokus pada neoliberalisme pada bidang agraria dengan konteks struktur ekonomi politik Indonesia yang mana penulis bagi menjadi dua yang pertama adalah bahwa kebijakan neoliberalisme tidak dapat hadir begitu saja namun memiliki berasal baik dari struktur ekonomi politik maupun pertarungan sosial yang menyebar sedangkan yang kedua adalah neoliberalisme broprasi dalam kebijakan pemberian sertifikat lahan nasional.

1.5.2 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lebih tepatnya penelitian kualitatif deskriptif jenis penelitian ini diambil karena dua hal yang pertama tujuan penelitian penulis dan yang kedua dikarenakan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan. Adapun penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan berbagai gejala sosial dimana

hal itu termasuk sebab, akibat dan juga proses dari gejala sosial tersebut adapun menurut Lawrence Neumann penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan rincian dari situasi, setting sosial dan juga hubungan serta pertanyaan bagaimana dan siapa (Neumann, 2007 : 16)

1.5.3 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini data yang penulis kumpulkan adalah data sekunder dan data primer yang mana data sekunder di dapat melalui berbagai literatur, Grafik dan Undang Undang yang dapat mendukung penelitian penulis sedangkan data primer merupakan data yang penulis dapat dari wawancara dengan narasumber dimana wawancara tersebut dilakukan dengan bantuan internet dan juga aplikasi zoom.

1.5.4 Teknik Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul diproses secara bertahap dari mulai pengumpulan data kemudian reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

1.5.5 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mencari data sebagaimana yang telah disebutkan yaitu data sekunder melalui studi literatur berupa buku, berita, dokumen undang-undang dsb sedangkan data primer melalui wawancara dengan narasumber.

1.5.6 Reduksi Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah untuk dikategorisasikan apakah data tersebut diperlukan atau tidak bentuk dari reduksi ini dapat berupa ringkasan. tahapan ini mempermudah penulis memproses data dan mengategorisasinya.

1.5.7 Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dimana data tersebut disajikan dalam bentuk narasi mengingat penelitian ini bukan penelitian kuantitatif adapun data-data yang sudah disajikan merupakan data-data yang sudah di reduksi dan bermakna hingga memungkinkan penarikan kesimpulan

1.5.8 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisa data dimana data data yang sudah didapatkan maknanya kemudian dicari kesimpulan secara keseluruhan.